

**PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BUHA KECAMATAN MAPANGET**

RIVALDY RENALDO BUYUNG

MARTHA OGOTAN

DEYSI L. TAMPONGANGOY

ABSTRAK : *The UN is a direct tax collected by the Central Government, but the results of its receipt are aimed at the interests of the community in the area concerned with the location of the tax object. However, there is a tendency towards the reluctance of the people of Buha Sub-District to pay the tax seen from various matters concerning the awareness of the community itself. Given the importance of the role of the community in bearing state funding, it is necessary to influence the leadership of the village head to be able to utilize the potential of land and building tax in his area and motivate his officials and the community to carry out their obligations in paying taxes. Therefore this study aims to determine the effect of village leadership on increasing public awareness in paying land and building taxes. Correlation of 0.284 (positive correlation) and from the results of testing the coefficient table for Lurah leadership variables of 0.307 with constants 29.007 can be seen hypothetically which states that there is an influence of Village Leadership on Public Awareness at a significant level of 1%.*

Keywords: *Leadership, Public Awareness in Paying PBB*

PENDAHULUAN

Adanya pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Untuk mendukung jalannya penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab di daerah secara professional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut telah di bentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bangunan nasional dalam

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan jenis-jenis pajak potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga merupakan salah satu sumber daya yang sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunannya. Tujuan utama pajak bumi dan bangunan ini adalah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan serta meningkatkan kemandirian daerah dari potensi yang ada.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk peningkatan penerimaan negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib itu sendiri.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan pajak bumi dan bangunan di Indonesia sangat penting, karena sebagian penerimaan negara, provinsi maupun kabupaten/kota adalah dari penarikan pajak bumi dan bangunan. Penarikan pajak bumi dan bangunan jika dilaksanakan semakin

cepat maka hasilnya semakin baik. Untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan dibutuhkan adanya kesadaran tinggi dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuntungan negara dan pemungutannya sudah di dasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran dalam keikutsertaan dalam menanggung pembiayaan negara maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan benar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Anggapan yang salah oleh masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan akan sangat merugikan bagi negara, oleh karena itu dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar, serta mau dan mampu membayar pajak.

Data pembayaran PBB di Kelurahan Buha di dua tahun terakhir sangat mengalami penurunan tercatat dari 2500 wajib pajak di Tahun 2017 dengan jumlah yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sebesar

Rp.230.000.000,hanya Rp.50.000.000 yang terkumpul atau di bayar oleh wajib pajak, sedangkan di Tahun 2018 dari bulan Januari sampai dengan bulan September yang baru terkumpul sebesar Rp.10.000.000 belum jatuh tempo dari Rp.344.000.000 .

Hal ini disebabkan oleh pengaruh kepemimpinan lurah dimana jabatan lurah sebelumnya masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak, kurangnya dorongan dan sosialisasi tentang pajak sehingga menimbulkan kecenderungan dan rasa enggan dari sebagian masyarakat kelurahan Buha dalam membayar pajak tersebut sehingga sangat terlihat jelas dari data di Tahun 2017 dimana masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak. Perbedaannya dengan lurah yang sekarang yang baru menjabat di Tahun 2018 rekapannya sampai bulan September belum jatuh tempo masih juga belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga terlihat jelas bahwa lurah sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sehingga untuk lebih menfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang terkait dengan pengaruh kepemimpinan lurah dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, maka peneliti mengambil Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget sebagai tempat penelitian. Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget yang dikenal dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan belum berjalan dengan baik, tidak luput dari adanya masalah dalam pembayaran PBB oleh masyarakatnya.

Dari uraian masalah diatas mengindikasikan adanya masalah pada pembayaran PBB. Untuk itu perlu adanya studi mendalam untuk mengkaji “Pengaruh Kepemimpinan Lurah terhadap peningkatan Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.

Dalam penelitian Stefi M. Sumaraw di tahun 2105 : “Pengaruh Kepemimpinan Camat terhadap Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan” Pengaruh Kepemimpinan Camat terhadap kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat pengaruh positif dari kepemimpinan Camat terhadap kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : ‘Sejauhmana tingkat Kepemimpinan Lurah terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan’ ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pemimpin dan kepemimpinan bermacam-macam menurut pengertian dari para ahli. Beberapa definisi tentang pemimpin yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya: Hasibuan (2011:157), pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggungjawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.

Kartono (2010:18) pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan

kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan tulang punggung organisasi, karena tanpa pemimpin yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka orang tersebut perlu memikirkan gaya kepemimpinannya. Menurut Kartono yang dikutip Syahrial (2009), gaya kepemimpinan adalah cara bekerja dan bertingkah laku pemimpin dalam membimbing para bawahannya untuk berbuat sesuatu. Sedangkan menurut Luthans (Syahrial, 2009) suatu hal yang pasti, gaya kepemimpinan dapat membuat perbedaan, baik positif maupun negatif.

Pengaruh Kepemimpinan Lurah

Pengaruh kepemimpinan lurah ini merupakan kepemimpinan formal yang perilaku kepemimpinannya hanya fokus terhadap peraturan yang ada dan menjalankan sebaik-baiknya. Dalam hal ini pengaruh kepemimpinan lurah dikategorikan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan, dikarenakan kepemimpinan lurah merupakan kewenangan kepemimpinan yang didapatnya dari jabatannya sebagai lurah, yang merupakan bagian dari sistem peranan formal. Kewenangan tersebut merupakan kekuasaan legitimasi. Artinya kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut

untuk meyakinkan bahwa individu yang berada dalam jabatan di bawahnya telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada.

Pengertian PBB

Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang perpajakan, namun semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Konsep Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaannya.

Siahaan (2010:106) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang. Kesadaran membayar

pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (200:12) mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak di tuntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

PEMBAHASAN

Variabel Kepemimpinan Lurah

Lurah merupakan kepala kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang membantu sebagian tugas camat seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan UU No. 73 pasal 4 dan 5 Tahun 2005. Dengan demikian lurah juga termasuk salah satu pemimpin birokrasi.

Menurut Miftah Thoha (2010: 9) pemimpin birokrasi merupakan : “Pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya. Para bawahan itu berada di bawah garis komandonya. Mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang berwenang mengaturnya. Dinamakan

pemimpin karena pada wujudnya ia bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada di kesatuannya ataupun fasilitas lain yang berada dalam wewenangnya

Variabel Kesadaran masyarakat

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaannya.

Menurut Siahaan (2010:106) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang.

Hasil Penelitian

Pengujian Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat kevalidan instrumen penelitian. Nilai koefisien korelasi product moment tersebut dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan program SPSS 20.0

Kriteria pengujian sebagai berikut:

Jika $R_{hitung} > r_{tabel}$ maka angket dikatakan valid

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka angket dikatakan tidak valid

Pengujian Reabilitas

Uji Reabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya atau menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi dalam hasil pengukuran. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan nama Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS 20.0 standar yang digunakan dalam menentukan reliable atau tidaknya suatu instrumen penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai r hitung dengan r tabel pada taraf kepercayaan 95% atau signifikan 5%.

Dan pengujian reliabilitas yang dilakukan 0,917 terhadap butir-butir yang valid, diperoleh koefisien reabilitas sebesar untuk variabel kepemimpinan lurah dan 0,919 sebesar untuk variabel kesadaran masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berstatus reliabel dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Analisis Korelasi Pearson Product Moment

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa korelasinya adalah 0,284 (korelasi positif) dan signifikan, dimana tingkat signifikannya sebesar 0,000

Hipotesisi :

H_0 : Kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat

H_a : Kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat

Kriteria Pengambilan Keputusan :

Jika nilai Sig. > 0,05 maka H_0 di terima

Jika nilai Sig. <0,05 maka H_0 di tolak

Hasil nilai signifikannya adalah 0,000 yaitu kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak. Sehingga kesimpulannya kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB

Analisis Regresi Linear Sederhana

dapat diketahui bahwa nilai F hitung yang diperoleh 19,887 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kepemimpinan lurah atau dengan kata lain ada pengaruh variabel kepemimpinan lurah (x) terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (y)

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan lurah di Kelurahan Buha

a. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila F hitung < F_{tabel} berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

b. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila F_{hitung} > F_{tabel} , berarti ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat

Berdasarkan tabel analisis regresi linear sederhana, terlihat hasil F hitung diperoleh sebesar 19,007 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka model dapat dipakai untuk memprediksi variabel kompetensi. harga F_{hitung} dibandingkan F_{tabel} dengan degree of freedom (df) yang didapat menggunakan rumus $df(n1) = n - k$, sehingga diperoleh sebesar 1,652 pada

taraf signifikan 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($19,007 > 1,652$) artinya kepemimpinan lurah berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kepemimpinan lurah (X) dan kesadaran masyarakat (Y) adalah linier dengan persamaan regresi. Dengan demikian terdapat hubungan yang berarti pada kedua variabel tersebut.

Berdasarkan hasil diatas, maka hipotesis yang dikemukakan dapat di terima yaitu kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat di Kelurahan Buha. Kemudian berdasarkan hasil uji korelasi pearson product moment untuk mengukur keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut. Didapatkan besar korelasi adalah 0,284 (korelasi positif) dengan signifikan sebesar 0,000 yang berarti kedua variabel ini cukup kuat dan signifikan dari angka signifikan (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$. Kepemimpinan lurah yang lebih baik akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut :

1. H_0 diterima H_a ditolak. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat

2. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$. Berarti ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Berdasarkan tabel analisa regresi linear sederhana, terlihat bahwa hasil F_{hitung} diperoleh sebesar 19,007 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05 maka model dapat dipakai untuk memprediksi variabel kepemimpinan lurah. Harga F_{hitung} dibandingkan F_{tabel} dengan degree of freedom (df) yang didapat menggunakan rumus $df(n1) = n-k$ sehingga diperoleh sebesar 1,652 pada taraf signifikan 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($19,007 > 1,652$) artinya kepemimpinan lurah (x) dan kesadaran masyarakat (y) adalah linear dengan persamaan regresi. Dengan demikian terdapat hubungan yang berarti pada kedua variabel tersebut.

Dari hasil pengujian tabel koefisien untuk variabel dapat diketahui hasil variabel kepemimpinan lurah sebesar 0,307 dengan konstanta sebesar 29,007 dapat dilihat hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat pada taraf signifikan 1%. Melalui penelitian ini dapat diketahui kepemimpinan lurah merupakan salah satu faktor penentu kesadaran masyarakat di Kelurahan Buha.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya, maka untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Dilihat dari indikator kepemimpinan camat yang dipakai dalam penelitian ini menunjukan bahwa kepemimpinan lurah di Kecamatan Buha sangat mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga perlu ditingkatkan.
2. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat perlu ditingkatkan, dengan adanya usaha dari lurah sebagai pemimpin tentunya akan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Saran

Beranjak dari penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan beberapa saran sebagai solusi atas permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Lurah Kecamatan Buha harus lebih aktif mengajak masyarakat dalam berpartisipasi membayar pajak bumi dan bangunan tentunya bekerja sama dengan para kepala lingkungan masing-masing , agar

suapaya partisipasi masyarakat dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan lebih meningkat.

2. Untuk indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebaiknya diperhatikan kembali untuk dapat dicari solusinya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Hasibuan. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kartono. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada
- Siahaan Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi
- Miftah Thoah. 2010. *Kepemimpinan dan Manajemen, Devisi Buku Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Sumber lain – lain :

UU No. 73 pasal 4 dan 5 Tahun 2005

